

DPRD Kaltim Gelar Monitoring 2026 dan P-APBD 2025



*Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle
(Sumber gambar: TribunKaltim.co) Senin, 02/06/2025*

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sabaruddin Panrecalle memimpin langsung agenda monitoring dan evaluasi terkait Penyusunan Prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dan Prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.

Agenda tersebut digelar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim. Dalam keterangannya usai rapat, Sabaruddin menyampaikan proses penyusunan prognosis tersebut tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi melibatkan hampir seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim.

Oleh karena itu, kerja sama lintas komisi yakni Komisi I, I, II, dan IV menjadi sangat penting dalam merumuskan anggaran, baik anggaran murni maupun anggaran perubahan. "Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekerjaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing. Idealnya, proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus," ungkapnya, Rabu (28/5/2025).

la menambahkan, Komisi II saat ini sedang menjalankan fungsi pengawasan dan hak dengar pendapat dengan mitra kerja, termasuk BPKAD dan Bapenda. Namun, dalam

pertemuannya kali ini, Kepala Bapenda tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain, sehingga penjabaran secara rinci belum dapat dilakukan. "Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam. *Inshaallah* dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh," tuturnya.

Mengenai realisasi anggaran, Sabaruddin mengatakan hingga saat ini belum ada data pasti yang diterima oleh Komisi II. Pihaknya meminta agar Kepala Dinas yang berkompeten bisa hadir langsung dalam rapat lanjutan, agar informasi yang diberikan lebih akurat dan komprehensif. "Kami berharap para Kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal," terangnya.

Agenda monitoring ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Benua Etam. (adv/hms7)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, DPRD Kaltim Gelar Monitoring 2026 dan P-APBD 2025, 02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan perda provinsi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
2. Dalam Pasal 99 UU 23/2014 diatur sebagai berikut.
 - (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
 - (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi;
 - c. membahas rancangan perda provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
 - d. membahas rancangan perda provinsi tentang pertanggungjawaban APBD provinsi.
3. Dalam Pasal 100 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan perda provinsi dan peraturan gubernur;

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.